

Kolaborasi Pemerintah Dan Komunitas Lokal Dalam Pencapaian SDGs di Tanoker Ledokombo Kabupaten Jember

Mutiara Novelina^{1*}, Ria Angin²

Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Received: 30/04/2026

Revised: 23/05/2026

Accepted: 26/05/2026

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kolaborasi antara Pemerintah Desa Sumber Lesung dan komunitas Tanoker Ledokombo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif serta diuji dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dilakukan melalui program sosialisasi, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan UMKM yang berdampak pada peningkatan keterampilan, peluang kerja, dan pendapatan masyarakat. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, sedangkan kendala berupa keterbatasan waktu partisipasi dan kurangnya komunikasi. Kesimpulannya, kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal mampu mendukung pembangunan berkelanjutan secara partisipatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci : Kolaborasi; Pemerintah Desa; Komunitas Lokal

Email

corresponding author:

mutiaranovelina16@gmail.com

Abstract

This study is motivated by the importance of collaboration between the government and local communities in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 8 on decent work and economic growth. This study aims to describe the form of collaboration between the Sumber Lesung Village Government and the Tanoker Ledokombo community, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. The method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using the analysis qualitative and tested through triangulation. The results show that the collaboration is implemented through programs such as socialization, skills training, and MSME empowerment, which have an impact on improving skills, job opportunities, and community income. Supporting factors include the support of the village government and community participation, while the obstacles include limited time for participation and lack of communication. In conclusion, collaboration between the government and local communities is able to support participatory and sustainable development and improve the welfare of rural communities

Keywords: Collaboration; Village Government; Local Community

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, proses pembangunan sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan degradasi lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan perlu memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun mendatang. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dengan tujuan menghapus kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Bagi Indonesia, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan ini diharapkan mampu mendorong negara menjadi lebih maju, berkembang di berbagai sektor, serta mengimplementasikan konsep ekonomi berkelanjutan secara optimal dan komprehensif, sehingga Indonesia dapat mencapai status sebagai negara maju sepenuhnya (Pangestu et al., 2021)

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan nasional yang mengatur pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu landasan hukum utama adalah Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun (2022) tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pencapaian SDGs. Melalui peraturan tersebut, pencapaian SDGs diarahkan untuk dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian memberi pemahaman tentang cara berpromosi yang efektif, melayani klien dengan baik menjadi peran yang perlu dilakukan (Angin, 2025).

Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan karena berada paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab menerjemahkan arah dan target SDGs ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang tidak hanya efisien dan transparan tetapi juga responsif terhadap kebutuhan individual dan kolektif (Hakeu & Alim, 2024). Dengan demikian, keberhasilan pencapaian SDGs di tingkat nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun memiliki peran strategis, pemerintah daerah dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, kapasitas aparatur, maupun koordinasi lintas sektor, sering kali menjadi hambatan dalam mencapai target SDGs secara optimal. Selain itu, kompleksitas permasalahan sosial dan ekonomi di tingkat lokal menuntut adanya pendekatan pembangunan yang lebih adaptif dan kontekstual. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga berpengaruh terhadap efektivitas program pembangunan berkelanjutan yang dijalankan di daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara mandiri. Permasalahan pembangunan menuntut adanya keterlibatan berbagai aktor di luar pemerintah yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi di tingkat lokal. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan aktor non-pemerintah, seperti komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi, menjadi penting untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang lebih partisipatif, efektif, dan berkelanjutan.

Salah satu contoh komunitas lokal yang berperan aktif dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat daerah adalah komunitas yang bernama Tanoker yang berkedudukan di kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Tanoker berasal dari bahasa Madura Pendalungan yang berarti kepompong, yang mencerminkan filosofi sebagai ruang untuk bertumbuh, bertransformasi, dan memberdayakan individu, khususnya anak-anak. Tanoker didirikan sebagai respon terhadap permasalahan sosial di wilayah Ledokombo, Kabupaten Jember, yang dikenal sebagai kampung buruh migran, di mana banyak anak mengalami permasalahan pengasuhan akibat orang tua bekerja sebagai TKW/TKI di luar negeri. Dalam menjalankan kegiatannya, Tanoker menggunakan pendekatan budaya dan permainan tradisional, terutama egrang, sebagai media pembelajaran, ekspresi, dan pemberdayaan, sehingga anak-anak dapat bermain, bergembira, serta mengembangkan potensi diri secara positif.

Seiring dengan perkembangannya, Tanoker Ledokombo tidak hanya berfokus pada isu pengasuhan anak, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, kegiatan Tanoker Ledokombo difokuskan pada kontribusinya terhadap SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), melalui penguatan ekonomi kreatif masyarakat, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif komunitas lokal memiliki potensi besar dalam

mendukung pencapaian SDGs di tingkat daerah.

Dalam implementasinya, Tanoker Ledokombo yang berada di Kecamatan Ledokombo menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Desa Sumber Lesung yang juga berada di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dalam mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bentuk kerja sama yang dilakukan meliputi penguatan ekonomi kreatif berbasis komunitas, pelatihan keterampilan masyarakat, memberi pemahaman tentang cara berpromosi yang efektif, melayani klien dengan baik. serta pengembangan potensi lokal yang bertujuan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat desa. Kolaborasi ini secara langsung mendukung pencapaian SDGs 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi di tingkat desa. Kelebihan Tanoker Ledokombo sebagai studi kasus dalam penelitian ini terletak pada perannya sebagai komunitas lokal yang mampu bekerja sama secara berkelanjutan dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal. Tanoker tidak hanya menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri, tetapi juga terlibat dalam program pembangunan Desa Sumber Lesung melalui kemitraan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan usaha berbasis komunitas. Pola kerja sama ini menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas lokal dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Lokasi penelitian berada di Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Sumber data terdiri dari data primer (wawancara, observasi) dan data sekunder (dokumen dan arsip). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang kompeten (Abdussamad, 2021), observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik.

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pembangunan berkelanjutan di Desa Sumber Lesung menunjukkan keterkaitan antara aspek sosial dan ekonomi dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pemerataan kesejahteraan melalui

prinsip no one left behind oleh Darniyus (2025), Pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga didukung oleh stabilitas sosial masyarakat sebagai fondasi utama.

Selain itu, integrasi antara aspek sosial dan ekonomi juga terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam program pembangunan desa. Kesadaran ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial yang menjadi modal utama dalam mendorong keberlanjutan program-program yang telah dijalankan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh dan berorientasi jangka panjang. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah desa dan komunitas Tanoker yang terbentuk secara bertahap sejak tahun 2018. Kolaborasi ini berkembang dari respons terhadap permasalahan sosial menjadi kerja sama yang lebih luas dalam pemberdayaan masyarakat melalui wadah SITI (Sistem Informasi dan Deteksi Dini). Proses ini menunjukkan bahwa kolaborasi lahir dari kesamaan tujuan dan kebutuhan bersama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan teori collaborative governance yang menyatakan bahwa kolaborasi merupakan proses pengambilan keputusan bersama antar aktor melalui kepercayaan, komunikasi, dan komitmen (Ansell & Gash, 2007). Dalam penelitian ini, keterlibatan langsung para aktor dalam pengambilan keputusan serta adanya forum bersama menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan secara partisipatif dan terstruktur. Hal ini memperkuat efektivitas program dalam mendukung pencapaian SDGs 8.

Menurut Ansell dan Gash (2007), collaborative governance memiliki beberapa indikator penting, yaitu dialog tatap muka, kepercayaan antaraktor, komitmen dalam proses kerja sama, pemahaman bersama, serta pencapaian hasil bersama. Dalam penelitian ini, dialog tatap muka terlihat dari adanya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Desa Sumber Lesung dan komunitas Tanoker dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Kepercayaan antaraktor tercermin dari hubungan kerja sama yang berlangsung secara berkelanjutan. Komitmen kedua pihak terlihat melalui keterlibatan aktif dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, adanya kesamaan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menunjukkan terbentuknya pemahaman bersama. Hasil kolaborasi tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat, keterampilan kerja, dan penguatan ekonomi lokal dalam mendukung pencapaian SDGs di tingkat desa.

Kolaborasi antara Pemerintah Desa Sumber Lesung dan komunitas Tanoker dapat berjalan karena adanya kesamaan tujuan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi

lokal. Keberhasilan kolaborasi ini didukung oleh komunikasi yang baik, kepercayaan antaraktor, partisipasi masyarakat, serta dukungan pemerintah desa sebagai fasilitator program. Sinergi tersebut membuat kegiatan pemberdayaan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian SDGs di tingkat desa.

Dari sisi ekonomi, program seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan UMKM terbukti mampu meningkatkan peluang kerja dan pendapatan masyarakat. Kegiatan festival desa juga menjadi bentuk nyata penguatan ekonomi lokal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kementerian PPN/Bappenas (2020) bahwa keberhasilan SDGs di tingkat daerah sangat bergantung pada sinergi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal. Selain itu, keberadaan program SITI menunjukkan bahwa stabilitas sosial berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi sejalan dengan penelitian Swastika (2025) mengungkapkan bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya sebagai koordinator dalam menghimpun partisipasi masyarakat serta sebagai fasilitator yang menjembatani berbagai kepentingan warga. Lingkungan yang aman dan kondusif memungkinkan masyarakat menjalankan usaha secara optimal, sehingga memperlihatkan bahwa aspek sosial dan ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan saling berkaitan.

Di samping itu, keberlanjutan program ekonomi lokal juga dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan kondisi eksternal, seperti perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi digital dan inovasi usaha agar masyarakat tidak hanya mampu bertahan, akan tetapi juga berkembang dalam menghadapi tantangan global. Hal ini menjadi penting agar hasil pembangunan yang telah dicapai dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator dan koordinator juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kolaborasi, sejalan dengan Sriwati et al (2024). Di sisi lain, komunitas Tanoker berperan sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan penguatan ekonomi lokal, sebagaimana ditegaskan oleh (Kasman K., 2024) Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan partisipasi masyarakat dan miskomunikasi antar pihak. Selain itu, belum adanya evaluasi bersama secara rutin menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance belum optimal. Ketergantungan pada peran komunitas juga menjadi potensi risiko bagi keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal memiliki signifikansi penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Temuan ini memperkuat kajian sebelumnya sekaligus memberikan implikasi bahwa

penguatan koordinasi, evaluasi berkelanjutan, dan pemerataan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan agar model kolaborasi dapat diterapkan secara lebih efektif di masa mendatang.

SIMPULAN

Kolaborasi antara Pemerintah Desa Sumber Lesung dan komunitas Tanoker Ledokombo terbukti mampu mendukung pencapaian SDG 8 melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi lokal. Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pemberdayaan UMKM. Untuk faktor yang mendukung adalah dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, sedangkan hambatan utama terletak pada keterbatasan waktu dan komunikasi. Secara keseluruhan, kolaborasi ini berkontribusi dalam menciptakan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Angin, R. (2025). *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian* *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian*. 9(1), 346–355.
- Darniyus, A.-A. (2025). Mengkaji Kolaborasi Kebijakan Publik dalam Percepatan SDGs Lingkungan Lokal: Tinjauan Pustaka Inisiatif di Berbagai Daerah. *Ikraith-Ekonomika*, 8(1), 722–729.
- Hakeu, F., & Alim, M. S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian SDGs melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Mohuyula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31314/mohuyula.3.1.1-9.2024>
- Harahap, A. M., Doloksaribu, T. I., Syaikhah, M., Syahri, W., Febiola, J., & Aprilia, G. (n.d.). *Sinergi Mahasiswa dan Masyarakat Desa: Model Kolaborasi Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Desa Silalahi I dan II*.
- Kasman K. (2024). Membangkitkan Kearifan Lokal: Peran Komunitas Dalam Pengembangan Daerah (Studi di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 7296–7306.
- Pangestu, F. P., Rahmadiani, N. S., Hardiyanti, Ni. T., & Yusida, E. (2021). Ekonomi Pancasila sebagai Pedoman dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 2021. www.globalgoals.org
- Presiden RI. (2022). Peraturan Presiden RI. No. 111 Tahun 2022. *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 124956, 1–11.
- Sriwati, E., Setiawati, B., Tahir, N., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., & Makassar, U. M. (2024). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur*. 5.

Swastika, A., Yasintha, N., & Winaya, K. (2025). Collaborative Governance dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 22(1), 64–71.

Undang-undang Nomor 59. (2024). Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59, 20*(Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional).

Widyawati, Sulmiah, Saguni, D. S., & Djabbari, M. H. (2024). Strategi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam Pelaksanaan Kebijakan SDGs Desa untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 96–237.